

**Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Tabungan Wadi'ah Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor
Cabang Pembantu Demak**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna
memperoleh gelar Diploma Tiga



Oleh :

Nadiya Khumairah

1605015076

**D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

H. Ahmad Furqon, L.C., MA

NIP. 19751218 200501 1 002

Perumahan BPI Blok N 11 Rt. Rw 06/09 Purwoyoso Ngaliyan Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdra Nadiya Khumairah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir dari saudara :

Nama : Nadiya Khumairah

NIM : 1605015076

Judul : Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Tabungan Wadiah Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu
Demak

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 08 Mei 2019

Pembimbing


H. Ahmad Furqon, L.C., MA

NIP. 19751218 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id — Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Nadiya Khumairah

NIM : 1605015076

Judul : **Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 02/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Tabungan Wadiah
Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Demak**

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang, pada tanggal:

05 Juli 2019

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan pogram studi
diploma 3 (D3) Perbankan Syariah Tahun Akademik 2019, guna memperoleh gelar Ahli Madya
Perbankan Syariah.

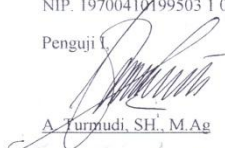
Semarang, 08 Juli 2019

Ketua Sidang/Penguji,


Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.

NIP. 19700410199503 1 001


Penguji I,


A. Turmudi, SH., M.Ag.

NIP. 19690708 200501 1 004

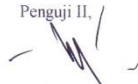


Sekretaris Sidang/Penguji,


Drs. Ratno Agriyanto, CA., CPA.

NIP. 19800128200801 1 010

Penguji II,


H. Khoirul Anwar, M.Ag.

NIP. 19690420199603 1 002

Pembimbing,


Drs. Ratno Agriyanto, CA., CPA.

NIP. 19800128200801 1 010

MOTTO

لَا أَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ # وَلَوْ تَوَالَّتْ زُمُرُ الْأَعْدَاءِ

*“Tak akan aku berpangku tangan karena takut berjuang, meskipun
cobaan datang bertubi-tubi.”*

(Nadhom Alfiyah Ibnu Malik: 302)

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan kepada:

Ayah, Ibu dan Kakak Tercinta

Kepada Ayah saya (Sukarman) dan Ibu saya (Mualifah), saya persembahkan karya kecil ini untuk kalian. Terimakasih atas kasih dan sayangnya yang tiada henti-hentinya kalian berikan pada putri bungsumu ini. Terimakasih pula atas doa yang setiap hari dipanjatkan untuk kesuksesan saya dalam tholabul ilmi dan tenaga yang telah kalian berikan, berkat nasihat dan semangat yang kalian tularkan, akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini meskipun banyak halang dan rintang yang menyertainya. Saya hanya bisa meminta maaf yang sebesar-besarnya karena sampai kapanpun seorang anak tidak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Semoga, setelah ini saya bisa selalu membahagiakan Ayah dan Ibu. Terima kasih juga kepada kakak (Mustafa) yang selalu mensupport usaha saya dalam tholabul ilmi.

Para Masyayikh Ma'had

Kepada Pengasuh Ponpes Mambaus Sholihin (Syeikh Masbuhin Faqih) dan Pengasuh Ponpes Fadlul Fadlan (Fadlolan Musyaffa' Mu'thy), beliau-beliau lah guru sekaligus motifator hidup saya dalam mencari ilmu. Terima kasih atas ketulusan doa yang selalu dipanjatkan untuk kesukse

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain. Demikian tugas akhir ini tidak dapat berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Mei 2019

Deklarator



NADIYA KHUMAIRAH

NIM 1605015076

ABSTRAK

Perbankan Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Dalam mendapatkan nasabah, mereka menawarkan produk simpanan dan pembiayaan yang dikemas secara menarik. Seperti, memberikan bonus, bagi hasil, hadiah, dan sebagainya. Begitu pula dengan BRI Syariah KCP Demak, mereka juga mengemas produk simpanan dan pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Pada produk simpanannya yaitu FAEDAH, BRI Syariah KCP Demak menggunakan akad wadi'ah (titipan). Kemudian, pada produk tersebut diberikan bonus setiap bulan. Melihat hal tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul “Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Wadia di BRI Syariah KCP Demak” dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan akad wadi'ah di BRI Syariah KCP Demak?

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dengan manajer, pegawai, dan nasabah BRI Syariah KCP Demak, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, jurnal, peraturan, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori wadi'ah. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan akad wadi'ah di BRI Syariah KCP Demak diterapkan pada produk tabungan faedah. Kedua, praktek pemberian imbalan pada akad wadi'ah di BRI Syariah KCP Demak sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, dengan melakukan analisa setiap poin yang ada pada fatwa tersebut dan dikaitkan dengan praktek di BRI Syariah KCP Demak.

Kata Kunci: (wadi'ah, simpanan)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Rasa Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan selalu atas Rasullullah SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Atas berkah, rahmat, dan kasih sayang-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Wadi’ah Di BRI Syariah KCP Demak” Tugas akhir ini disusun untuk memperoleh gelar ahlimadya diploma tiga (D3) dalam progam studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang. Penulis sadar bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha penulis tidak akan tercapai dan berarti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak H. Ahmad Furqon, LC. MA. selaku pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, arahan serta nasehat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag., MM. selaku wali studi yang senantiasa membina dalam proses akademik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu pada khususnya dan segenap Bapak dan Ibu dosen di lingkungan UIN Walisongo Semarang pada umumnya.

5. Segenap staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya dan segenap staff dan karyawan di lingkungan UIN Walisongo Semarang pada umumnya.
6. Kepada Bapak Pujo Budi Winarto selaku Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Demak yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian di BRI Syariah KCP Demak.
7. Kepada Mba Annisa, Mas Dwi, Pak Naim, Pak Edi, dan Pak Baskoro selaku karyawan BMT Al Hikmah Ungaran yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis ketika melakukan penelitian.
8. Kepada Ayah, Ibu, dan Kakak yang telah memberikan semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada keluarga D3 PBS-B 2016 yang senantiasa ada di saat penulis membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan telah turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 22 Mei 2019
Penulis

Nadiya Khumairah
NIM 1605015076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Mekanisme Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Fatwa DSN MUI.....	18
B. Konsep Tabungan Wadiah.....	32
BAB III GAMBARAN UMUM BRISyariah KCP Demak.....	45
A. Sejarah Berdirinya BRISyariah.....	45
B. Visi, Misi.....	47

C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	47
D. Ruang Lingkup Kegiatan.....	48
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	57
A. Implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan Faedah di BRISyariah KCP Demak.....	57
B. Bonus Tabungan Faedah	64
C. Analisis Praktek Pemberian Imbalan Pada Akad Wadi'ah Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Demak Dan Relevansinya Dengan Fatwa DSN-MUI NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.....	65
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satu pun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan.¹ Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.² Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, dimana tolak ukur keberhasilan suatu negara dilihat dari pengguna sektor kegiatan keuangan. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, makin baik pula kondisi perekonomian suatu negara.

¹ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 17.

² Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 29.

Di Indonesia sendiri lembaga keuangan bank terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan bunga, akan tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan dengan landasan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan kata lain, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah.³

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan industri perbankan konvensional. Hingga saat ini perbankan syariah masih terus berjuang mempertahankan eksistensinya dalam industri keuangan, dengan proses perkembangannya yang cukup menakutkan meskipun bila dibandingkan dengan negara-negara yang tercatat dalam Islamic Finance Country Index, Indonesia terbilang berjalan ditempat. Perbankan syariah mulai diakui eksistensinya pada saat dikeluarkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang bank yang menerapkan konsep bagi hasil, meskipun tidak disebutkan secara jelas terkait prinsip syariahnya. Semenjak itu Bank

³ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 1.

Muamalat yang merupakan bank Islam pertama mulai beroperasi di Indonesia. Eksistensi perbankan syariah semakin kuat ketika disahkannya UU No.10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No.7 Tahun 1992. Dalam undang-undang yang diperbaharui tersebut disebutkan secara jelas bahwa Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah.

Dengan sistem keuangan dan perbankan yang dimiliki, ini merupakan bagian dari konsep yang lebih luas ketika berbicara mengenai ekonomi Islam. Dimana tujuannya sebagaimana dianjurkan oleh para ulama adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah, maka keuangan dan perbankan Islam bagi kebanyakan Muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersil. Persepsi Islam dalam transaksi finansial itu di pandang oleh banyak kalangan Muslim sebagai kewajiban agama.⁴ Sistem Perbankan yang terdiri dari lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha yang memungkinkan bank melaksanakan fungsinya dengan baik. Dengan sistem inilah Bank Muamalat Indonesia menyediakan salah satu jasa layanan produk Funding (penanaman dana) untuk mempermudah nasabahnya dalam menghimpun dana dari berbagai kebutuhan nasabahnya.

⁴ Wahyudin Mahguni, "Mengenal Sistem Operasional, Jasa Dan Produk Perbankan Syariah", Ejournal IAIN Kendari, 2008.

Perbankan Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariat Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerjasama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan atau bentuk lainnya sesuai dengan syariat Islam.⁵

Pertumbuhan setiap Bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Di Indonesia saat ini, penduduk dewasa yang memiliki rekening tabungan di bank hanya sebesar 58 juta dari kurang lebih 138 juta, atau sekitar 42%. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 80 juta yang belum memiliki rekening untuk tabungan. Bagi penduduk yang belum menabung dan ingin menabungkan uangnya di bank, tentunya harus selektif memilih diantara dua jenis perbankan di Indonesia untuk menabung dan harus punya banyak

⁵ Ismail, Perbankan Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 32.

pertimbangan, agar tidak ada unsur dirugikan dan tetap menguntungkan nasabah, baik secara administrasi maupun dalam hal pembagian keuntungan.⁶

Produk tabungan yang disediakan oleh perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki perbedaan. Perbedaan ini merupakan hasil dari penerapan prinsip yang diterapkan oleh perbankan syariah dan konvensional. Perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) dalam aktivitasnya. Berdasarkan prinsip tersebut, dalam menyediakan produk tabungan, juga terdapat perbedaan, yaitu perbankan syariah menggunakan wadiah dan mudharabah dengan sistem bonus atau pembagian keuntungan bagi hasil (profit lost sharing) sedangkan perbankan konvensional dalam pembagian bonus tabungannya berdasarkan suku bunga (interest).

Dalam perbankan Syariah produk yang ditawarkan dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana (financing), dan produk jasa (service).⁷

Adapun yang masuk kategori penghimpunan dana (funding) adalah seperti tabungan, deposito, dan giro. Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan tidak

⁶ Dian Pramana, “Analisis Komparatif Perhitungan Bonus Antara Produk Tabungan (Suku Bunga) Dan Tabungan Mudharabah Serta Tabungan Wadiah”, Jurnal Mahasiswa Unesa, 2013.

⁷ Irham Fahmi, Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 36.

membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsipnya. Dalam produk penghimpunan dana (funding) bank syariah menggunakan dua prinsip, yaitu prinsip wadi'ah yad dhamanah yang diaplikasikan pada giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah dan prinsip mudharabah mutlaqah yang diaplikasikan pada produk deposito mudharabah dan tabungan mudharabah.

Apapun nama produk, yang diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut, karena hal ini sangat terkait dengan besaran hasil usaha yang akan diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana/deposan (shahibul maal) dengan bank syariah sebagai mudharib.

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁸ Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun, atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan “bonus” kepada penitip.

⁸ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (Ciputat: Referensi GP Press Group, 2014), hlm. 123.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah. Selain itu, tabungan wadiah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Wadiah adalah transaksi penitip dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.⁹ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁰

⁹ Ahmad Dahlan, Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 137.

¹⁰ Ibid, hlm. 137.

Dengan melihat uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan akad wadi'ah berdasarkan pada Fatwa DSN –MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000. Dengan demikian maka melalui laporan penulisan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul **“Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Wadiah Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Demak”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan masalahnya, sebagai berikut: “Bagaimanakah pelaksanaan tabungan dalam akad wadiah di Bank Syariah menurut Fatwa DSN –MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penyusunan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui bagaimana konsep tabungan dalam akad wadiah di Bank Syariah menurut Fatwa DSN –MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk menganalisis antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Ahlimadya Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang ketika diadakan penelitian yang lebih lanjut.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pemahaman masyarakat yang ingin melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya dalam bentuk simpanan yang menggunakan akad wadi'ah.

E. TELAAH PUSTAKA

Sebelum dikeluarkannya Fatwa DSN MUI tentang tabungan menggunakan akad wadiah telah banyak penelitian yang dilakukan oleh para praktisi ekonomi islam, para ulama, serta para kalangan akademisi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian dan tulisan lepas yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan peneliti temui sejauh penelusuran peneliti tentang tabungan menggunakan akad wadiah. Namun demikian, pembahasan mengenai konsep tabungan menggunakan akad wadiah di bank syariah yang mengkaji atas Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 belum banyak dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang

dilakukan oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Wadi’ah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Di Bmt Al Hikmah Ungaran” membahas tentang pelaksanaan akad wadi’ah di BMT Al Hikmah Ungaran serta ketentuan pemberian imbalan pada akad wadi’ah di BMT Al Hikmah Ungaran. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad wadi’ah di BMT Al Hikmah Ungaran adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil dengan nisbah 80% untuk BMT dan 20% untuk anggota. Dalam Hukum Islam hal tersebut hukumnya adalah batal, karena prinsip wadi’ah yad dhamanah adalah imbalan tidak boleh diperjanjikan. Karena menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan imbalan bersyarat. Sedangkan imbalan bersyarat adalah imbalan yang tidak dibenarkan menurut fatwa tersebut.

Skripsi yang berjudul “Analisis Akad Wadi’ah pada Tabungan iB Hasanah di Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Unissula Semarang” membahas tentang penerapan akad wadi’ah pada Bank BNI Syariah. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penerapan akad wadi’ah pada BNI Syariah mempunyai dua skim yaitu: Wadi’ah dan Mudharabah Mutlaqah dan mempunyai perbandingan biaya yang mana akad wadi’ah lebih murah dibandingkan dengan akad mudharabah mutlaqah. Tinjauan syariah

akad wadi'ah dapat disimpulkan bahwa Bank BNI Syariah menggunakan akad Wadi'ah sudah sesuai prinsip syariah, yang diperjelas dengan adanya rukun dan syarat, serta didasari dengan adanya FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO:02/DSN-MUI/IV/2000 yang memutuskan tentang Tabungan, Ketentuan umum tabungan berdasarkan Mudharabah, dan Ketentuan umum tabungan berdasarkan Wadi'ah.

Tugas akhir yang berjudul "Implementasi Akad Wadiah produk Si Tampan di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Nusa Indah Cepiring." Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research dengan tempat penilitian KJKS Nusa Indah dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dandokumentasi. Penelitian ini berisi akad Wadiah pada produk Si Tampan dengan prosedur anggota mendaftar ke KJKS Nusa Indah lewat kolektor yang ditunjuk. Di KJKS Nusa Indah danadikelola melalui pembiayaan yang mendapatkan bagi hasil. Dari pendapatan tersebut KJKS memberikan bonus kepada anggotanya setiap bulan dan bonus di akhir pengembalian uang tersebut.

Adapun posisi penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya diantara yaitu sama-sama membahas tentang implementasi tabungan wadiah di lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian ini

membahas tentang analisa fatwa DSN tentang tabungan menggunakan akad wadiah.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Pada penelitian ini, penulis bermaksud mengetahui bagaimana implemetasi akad wadi'ah pada tabungan faedah di BRISyariah KCP Demak, sesuai dengan prinsip syariah dengan berdasarkan kasus dan survey yang telah dilakukan oleh penulis.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat deskriptifkualitatif karena berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data yang di peroleh dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama (primer) yaitu pimpinan, karyawan dan nasabah BRISyariah KCP Demak

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadipelengkap dari sumberdata primer. Sedangkan menurut Nasution, bahan sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi dan klasifikasi menurut keperluan mereka.klasifikasi itu mungkin tidak sesuai bagi keperluan penulis dan karena itu harusmenyusunnya kembali menurut kepentingan masalah yang di hadapi, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah semua buku-buku penunjang dan data-data dokumen dari obyek penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu, yang kemudian analitik dimaksudkan untuk menganalisis data yang sudah didapatkan guna untuk mengetahui konsep tabungan menggunakan akad wadiah di Bank Syariah, dengan demikian, memberikan peninjauan dengan menggunakan teori hukum islam dan materi hukum dari

Fatwa DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

d. Wawancara

Wawancara/interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi, dengan metode ini penulis ingin memperoleh data secara langsung mengenai bagaimana implementasi akad wadi'ah pada tabungan faedah di BRISyariah KCP Demak. Metode wawancara ini ditunjukkan kepada Tedy Amal Satia selaku Branch Officer Supervisor (BOS), Almira selaku Customer Service

e. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

f. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisis penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif

analisis adalah kegiatan penelitian dengan menganalisa gambaran atau fakta yang ada di lapangan. Metode deskriptif yaitu suatu metode yang meneliti sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, dan pemikiran pada masa sekarang. Penelitian analisis merupakan penelitian yang ditujukan untuk meneliti secara terperinci suatu aktivitas atau kejadian dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk keperluan penelitian yang akan datang.¹¹

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi di BRISyariah KCP Demak akan diolah dengan menggunakan tehnik deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan. Penulis menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori pokok masalah, sedangkan data dokumentasi digunakan untuk menunjang hasil wawancara.

Dalam menganalisis data peneliti mengawali dengan merangkum data yang diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan rumusan masalah, yang berarti data mengenai tabungan menggunakan akad wadiah di bank syariah. Selanjutnya data yang telah dirangkum dan dipilih, untuk kemudian disajikan dalam

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009, hlm. 47.

kalimat-kalimat yang sekiranya akan mudah untuk dipahami dan sesuai standar penelitian. Proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari beberapa tahapan yang telah dilalui dimaksudkan untuk penentuan data akhir dari keseluruhan proses tahapan analisis, sehingga keseluruhan permasalahan mengenai konsep tabungan menggunakan akad wadiah serta tentang ketentuan hukum islam dan Fatwa MUI tentang tabungan tersebut dapat dipahami dan dituangkan dalam hasil penelitian yang akurat.

G. MEKANISME PENULISAN

Penelitian ini dilakukan dengan melalui upaya yang sistematis agar hasilnya dapat diperoleh secara maksimal. Pembahasan yang dituangkan dalam beberapa bab akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama, menguraikan tentang pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis mencoba memaparkan tentang konsep wadiah dalam fiqih muamalah, rukun dan syarat wadiah, jenis-jenis wadiah, dan landasan hukum wadiah. Juga akan memaparkan tentang tabungan secara umum, peraturan-peraturan yang mengatur tabungan, dan fasilitas tabungan.

Bab ketiga, penulis mencoba memaparkan tinjauan umum tentang Fatwa DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan agar diketahui apa yang menjadi pokok pembahasan dan membahas MUI secara menyeluruh meliputi profil, tugas dan

wewenang, sejarah ditetapkan fatwa tersebut, dan landasan syariahnya.

Bab keempat, dibahas mengenai analisis konsep tabungan menggunakan akad wadiah dalam Fatwa DSN–MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan indikator-indikator terkait pemberian bonus yang ada di perbankan syariah.

Bab kelima, diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan penyusun mengenai pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan saran-saran untuk pengembangan studi selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Tabungan Wadiah

Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.¹²

1. Definisi Wadiah

Al Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.¹³

Barang titipan dalam fiqh dikenal dengan sebutan wadi'ah, menurut bahasa, wadi'ah ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga (*Ma Wudi'a 'Inda Ghair Malikihi Layahfadzuhu*), berarti bahwa wadi'ah ialah memberikan, makna yang kedua wadi'ah dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata: "*awda'tuhu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu minhu dzalika al-Mal Liyakuna Wadi'ah 'Indi*), secara bahasa wadi'ah memiliki 2 makna, yakni memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimaannya.¹⁴

¹²Adiwarman A. Karim, Bank Islam analisis fiqh dan keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 297

¹³ Ibid., 23

¹⁴ Ahmad Basri bin Ibrahim, Azman bin Mohd Noor, "The Application of Wadi'ah Contract By Some Financial Institutions in Malaysia", *International*

Dalam tradisi islam, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Secara etimologi, kata wadi'ah berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Wadi'ah juga berarti titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁵

Secara etimologi *al-wadi'ah* sendiri banyak didefinisikan oleh para ulama, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah *al-wadi'ah* memiliki dua arti, arti pertama ialah:

عِبَارَةٌ عَنْ تَوَكُّلٍ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِ الْمَالِ

“Ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara *mujarrad*”

- b. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah :

الْعَقْدُ الْمُقْتَضَى لِحِفْظِ الشَّيْءِ الْمَوْدَعِ

“Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan”

- c. Menurut Hasbi Ash-Shidique *al-wadi'ah* ialah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip.

- d. Menurut Idris Ahmad bahwa titipan artinya barang yang diserahkan (diamanahkan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.

Selain dari pendapat-pendapat ulama tersebut, terdapat beberapa definisi lain. Di antaranya, yaitu:

- a. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
al-wadi'ah diartikan sebagai penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.
- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam pasal 763 yang dimaksud dengan barang titipan (*wadi'ah*) adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman.¹⁶
- c. Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia bab 1, pasal 1 ayat (5): *Wadi'ah* adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut'.¹⁷
- d. Menurut PSAK 59, Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang

¹⁶A. Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*. (Bandung: Kiblat Press, 2002), hlm.167.

¹⁷Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/7/Pbi/2004, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Gubernur Bank Indonesia*, dalam <http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/Moneter2004/PBI-67-04.pdf>, diakses pada 20 April 2019.

bersangkutan menghendaki Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.¹⁸

Setelah diketahui definisi-definisi *al-wadi'ah* yang telah dijelaskan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.

Bank Islam seperti halnya bank konvensional, juga dapat memberikan jasa rekening giro kepada nasabahnya. Hal itu dilakukan dengan memberikan jasa yang disebut wadi'ah. Dalam bahasa Indonesia berarti titipan. Akad wadi'ah merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia.¹⁹

2. Landasan Hukum Wadiah

Beberapa dasar hukum yang melandasi wadi'ah, di antaranya:

a. Al-Quran

a) Q.S. An-Nisa Ayat 58

¹⁸ Wiroso, Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 21.

¹⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 55

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya disaat pemilik harta titipan memintanya dan penerima titipan wajib mengembalikan amanat tersebut tepat waktu sesuai dengan kesepakatan oleh keduanya. Penerima titipan juga wajib mengembalikannya secara jujur, artinya tidak menipu dan menyembunyikan rahasia dari pemilik titipan tersebut. Menurut para mufasir, ayat tersebut turun karena berkaitan dengan penitipan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah (seorang sahabat Nabi) sebagai amanat dari Allah.

b) Q.S. al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan apabila dalam melakukan akad wadi'ah haruslah saling mempercayai dan baik sangka pada masing-masing pihak, yaitu tidak adanya pengkhianatan atau mengingkari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Penerima titipan juga harus dapat menunaikan amanat yang diberikan penitip harta kepadanya sebaik mungkin. Penerima titipan harus dapat mempercayai dirinya sendiri bahwa ia sanggup menjaga harta titipan yang diserahkan kepadanya tersebut, karena makruh hukumnya terhadap orang yang dapat menjaganya tetapi ia tidak percaya pada dirinya sendiri bahwa ia dapat menjaganya. Selain itu apabila seseorang tersebut tidak kuasa atau tidak sanggup untuk menjaga harta titipan sebagaimana mestinya hukumnya haram, karena seolah-olah ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkan tersebut.

b. Hadist

- a) Hadist yang menjadi landasan wadi'ah, yaitu:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa' 5/381).

Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah juga mendapat pahala, disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi.

- b) Hadits yang diriwayatkan dari Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi saw, bersabda:

مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

“Barang Siapa yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin”. (Ibnu Majah: Jilid 2: 353)

Hadits ini menerangkan bahwa orang yang menerima titipan tidak berkewajiban menjamin kecuali apabila dia tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan.

Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah telah bersabda, “Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang

tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci”. (HR. Thabrani)²⁰

c) Ijma’

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma’ (konsesus) terhadap legitimasi *al-wadi’ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Az-Zuhayly dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatul* dari Kitab *al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibn Qudamah dan Mubsuth li Imam Sarakhsy*.²¹

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan). Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadis, „Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.

²⁰ M. Nur Rianto al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 37

²¹ Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1992), hlm.17-19.

3. Syarat dan Rukun Wadiah

Rukun merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan, jika rukun tersebut tidak ada salah satu, maka akad wadi'ah tidak sah. Wadi'ah mempunyai tiga rukun yang harus dilaksanakan. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadi'ah menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang menitipkan barang (muwadi')
- b. Orang yang dititipi barang (wadi')
- c. Barang yang dititipkan (wadi'ah)
- d. Ijab qabul (sighat)

Menurut ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun wadi'ah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat bukan rukun. Sedangkan sahnya perjanjian wadi'ah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan akad sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad wadi'ah, merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil sekalipun telah berakal, akan tetapi tidak dibenarkan melakukan akad wadi'ah, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang. Disamping itu, jumhur ulama juga mensyaratkan orang yang berakad harus cerdas. Sekalipun

telah berakal dan baligh, tetapi kalau tidak cerdas, hukum wadi'ah -nya tidak sah.

- b. Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai. maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.
- c. Bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut di tempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan.

4. Jenis-jenis Wadiah

Dalam praktik di dunia perbankan, modal penitipan (wadi'ah) ini sudah lama dijalankan, termasuk diperbankan syari'ah. Transaksi wadi'ah dapat terjadi pada giro dan/atau tabungan. Hanya dalam perbankan syari'ah akad wadi'ah masih digolongkan menjadi dua bagian, yakni *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

a) *Wadi'ah Yad Amanah*

Wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang/uang dimana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang/uang titipan yang bukan di akibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

Barang/asset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat

berharga atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (custodian) sebagai penerima kepercayaan (trustee) adalah yad al-amanah atau “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggungjawab pemeliharaan.

b) *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadiah yad dhamanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Hal seperti ini digunakan oleh perbankan Syariah dalam giro dan tabungan.

Dalam *wadi'ah amanah*²², pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga. Akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai kontraprestasi atas penjagaan

²²Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 85.

barang yang dititipkan. Pada *wadi'ah yad dhamanah*²³ pihak yang dititipkan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan pihak bank.

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.

Dalam aplikasi perbankan akad wadi'ah yad dhamanah dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank memberikan bonus pada pihak nasabah. Peluang bank

²³Ibid, hlm. 87.

dalam menggunakan dana terbatas, karena pemilik bisa mengambil barangnya sewaktu-waktu melalui buku tabungan.

Menurut ascarya prinsip yadh dhammanah “tangan pengganggu” yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. Pernyataan tersebut berarti bahwa pihak penyimpan merupakan penjamin keamanan barang/aset yang dititipkan, dan juga mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki.

Karakteristik Wadiah Yad Dhamanah:

1. Merupakan pengembangan dari Wadiah Yad Amanah yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian.
2. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari barang tersebut.
3. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.
4. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut mejadi hak penerima titipan.

5. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/ dana dapat diberikan semacam intensif berupa bonus, yang tidak diisyaratkan sebelumnya.

Ketentuan-ketentuan wadi'ah yadh dhammanah

Menurut Ascarya, beberapa ketentuan wadi'ah yadh dhammanah antara lain :

1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan.
2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya di investasikan.
3. Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/terdepresiasi.
4. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah/hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperoleh.
5. Penitip tidak memiliki hak suara.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akad wadi'ah yadh dhammanah memiliki beberapa ketentuan seperti yang telah disebutkan diatas, antara lain penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset, penitip memiliki hak untuk mengetahui kondisi asetnya, penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal

berkurang, setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah/hadiah.

B. Fatwa DSN-MUI

1. Definisi Fatwa

Fatwa (Arab: فتوى, *fatwā*) adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia.²⁴

Fatwa secara syariat bermakna, penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari al-Quran,

²⁴ Racmat Taufik Hidayat dkk., *Almanak Alam Islami*, 2000, Pustaka Jaya: Jakarta

Sunnah Nabawiyyah, dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Di Indonesia, fatwa-fatwa hukum Islam dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dilihat dari aspek sosial kemasyarakatan, eksistensi MUI dipandang sangat penting di tengah realitas pluralitas masyarakat Islam Indonesia. Kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran. Ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina

MUI menetapkan sejumlah adab (kode etik) dan persyaratan yang sangat ketat dan berat bagi seorang yang akan menjadi mufti. Di antara prinsip dan persyaratan tersebut adalah bahwa mufti (orang atau lembaga yang memberikan fatwa) harus mengetahui hukum Islam secara mendalam berikut dalil-dalilnya. Tidak dibenarkan berfatwa hanya berdasarkan keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan yang tidak ada dasarnya pada dalil. Fatwa harus dikeluarkan oleh orang atau lembaga yang mempunyai kompetensi, karena fatwa yang dikeluarkan secara sembarangan akan melahirkan tindakan *tahakkum* (perbuatan membuat-buat hukum).

Yang dapat dijadikan dasar penetapan fatwa menjadi dua kelompok, yakni: dalil-dalil hukum yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (adillah al-ahkam al-mutafaq ‘alaih) dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha). Para ulama juga telah menjelaskan apa saja dalil-dalil hukum yang disepakati untuk dijadikan dasar penetapan fatwa yaitu al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’, dan Qiyas

Islam sebagai rahmatan lil alamin, mengatur segala aspek kehidupan baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah, diatur dalam fiqh muamalah. Fiqh muamalah merupakan kumpulan hukum yang disyariatkan Islam yang mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia. Dalam fiqh pada umumnya dikenal istilah fatwa, yakni secara literal, kata ”al-fatwa” bermakna ”jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-perundangan yang sulit”.

2. Kedudukan dan Kewenangan Fatwa DSN MUI Dalam Perbankan Syariah

Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan hukum perbankan syariah berada di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Karena perkembangan lembaga keuangan syariah yang cukup pesat, maka diperlukan adanya suatu lembaga khusus

yang menangani masalahmasalah terkait dengan sistem ekonomi syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat membentuk satu dewan syariah berskala nasional yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. Kep 754/MUI/II/1999.²⁵

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam upaya pengembangan produk hukum perbankan syariah. Karena dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada sistem hukum yang dibangun berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang keberadaannya berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat islam.²⁶

Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pengembangan lembaga ekonomi dan perbankan syariah dikeluarkan atas pertimbangan Badan Pelaksana Harian (PPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi perbankan. Dengan adanya pertimbangan dari para ahli tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. karena itu agar

²⁵ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 69-70.

²⁶ *Ibid.*, 76

fatwa memiliki kekuatan mengikat, sebelumnya perlu diadopsi dan disahkan secara formal ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Namun agar peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah dapat dijalankan dengan baik, maka DSN-MUI membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah. Tujuannya adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syariah yang ada dalam perbankan.

Terdapat hal yang menarik mengenai fatwa-fatwa yang diterbitkan MUI dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Fatwa-fatwa MUI ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu ekonomi syariah, kehalalan produk, dan kemasyarakatan. Dari tiga kategori ini, fatwa kategori ekonomi syariah memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan dua kategori lainnya. Kedudukan yang lebih kuat maksudnya adalah fatwa-fatwa kategori ekonomi syariah diakui dan dikuatkan keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila pihak-pihak yang terkait dengan peraturan ini tidak melaksanakan fatwa tersebut akan mendapatkan sanksi administrasi dari pemerintah. Fatwa-fatwa DSN tidak hanya mengenai kegiatan, produk dan jasa yang akan dioperasionalkan oleh suatu bank syariah, tetapi juga mengenai ketentuan ekonomi syariah (keuangan syariah) yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI).

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam (Syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari'ah. Melalui Dewan Pengawas Syari'ah yang melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syari'ah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syariah (LKS).

DSN-MUI merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa sebagai rujukan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, keuangan dan perbankan.²⁷ Sejak dibentuknya DSN, sampai dengan tahun 2009 telah terbit 73 fatwa DSN yang terdiri dari 22 fatwa khusus mengatur perbankan syari'ah, 5 fatwa khusus mengatur asuransi syari'ah, 11 fatwa khusus mengatur pasar modal syari'ah, dan 35 fatwa mengatur kegiatan ekonomi syariah secara umum.

²⁷ Imam Abdul Hadi, "Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada Bank Syariah," Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, No. 2 Vol 1 (2011), 3.

Untuk memperkuat kewenangan sebagai bank sentral yang mengurus sistem keuangan syariah dalam negara republik Indonesia, Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan DSN-MUI yang memiliki otoritas di bidang hukum syariah. Bentuk kerja sama antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui nota kesepahaman (Memorandum of understanding/MOU) untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Dengan adanya kerja sama tersebut berarti keberadaan DSN-MUI menjadi sangat penting dalam pengembangan sistem ekonomi dan perbankan syariah.²⁸

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI bukanlah hukum positif, sama seperti fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI dalam bidang-bidang lainnya. Agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat berlaku dan mengikat sebagaimana hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah disebutkan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dapat ditinjau lanjuti sebagai Peraturan Bank Indonesia.

DSN sebagai anggota dari Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar yang terkait

²⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014), 9.

dalam bidang muamalah syariah. Adapun tugas DSN adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Untuk memudahkan peran DSN dalam menjalankan tugasnya, DSN-MUI memiliki wewenang yang berlaku bagi seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti (Kementerian Keuangan) dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk

otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
 - f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.²⁹
3. Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dengan Akad Wadiah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat. Dalam sebuah bank terdapat minimal dua macam kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana untuk kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 juga secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah, yaitu bank umum maupun bank perkreditan rakyat yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

²⁹ Ibid., 5

Prinsip syariah juga dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dalam pasal itu itu disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Lembaga dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional-Ulama Majelis Indonesia (DSN-MUI).

Prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah menurut UUPS adalah prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan selanjutnya telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Lebih lanjut Sutan Remy Sjahdeini menyebut prinsip ini sebagai prinsip syariah perbankan dan telah menjadi hukum positif karena adanya penunjukan oleh UUPS sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh bank syariah maupun UUS. Pelanggaran terhadap prinsip syariah Perbankan akan mengakibatkan akad-akad yang dibuat antara Bank Syarian dan nasabah menjadi batal demi hukum.³⁰

Dalam sistem perbankan syariah kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan dengan melalui produk-produk berupa (demand deposit), tabungan (saving deposit), deposito (time deposit). Perbedaannya dengan bank konvensional adalah

³⁰ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 77-78.

bahwa dalam perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah.

Dijelaskan pada UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa prinsip syariah berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Salah satu prinsip dalam ekonomi islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil (mudharabah). Seperti yang tertera pada Pasal 1 ayat 21 UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui rapat pleno pada tanggal 1 April 2000 mengeluarkan keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tabungan. Pada fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan tabungan ada dua jenis:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah:

- a. Bersifat simpanan.

- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Berkaitan dengan ketentuan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berkenaan dengan berlakunya prinsip syariah yang telah dibahas diatas dan dengan telah keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 2 tentang Tabungan. Maka lembaga keuangan syariah yang akan menerapkan atau menjalankan produk tabungan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah dan Visi Misi serta Legalitas BRISyariah

1. Sejarah BRISyariah

Berawal dari akuisisi PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) , Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRISyari'ah secara resmi beroperasi . kemudian PT.Bank secara resmi beroperasi .kemudian PT.Bank BRISyari'ah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam. Dua tahun lebih PT. Bank BRISyari'ah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*Service Excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah .

Kehadiran PT.Bank Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan . Logo ini menggambarkan keinginan

dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Aktivitas PT. Bank Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat Ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai kantor layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

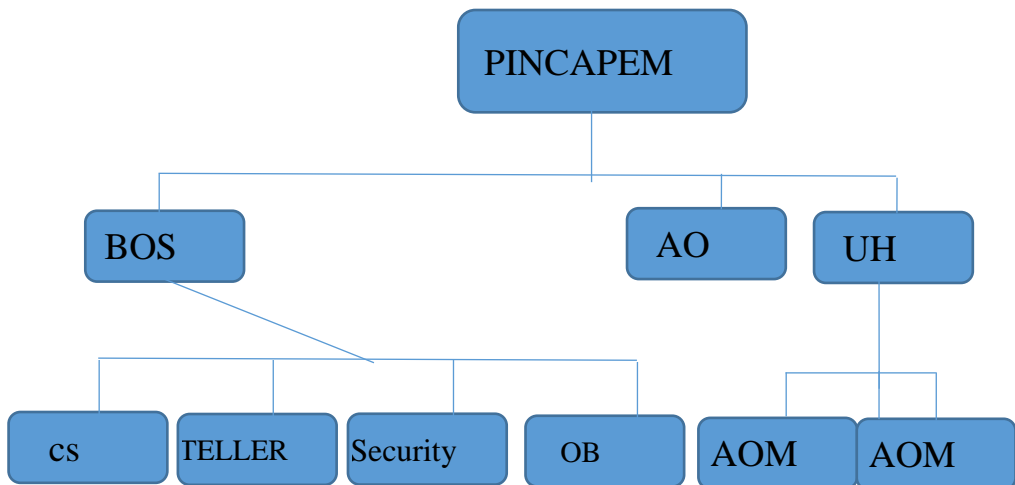
2. Visi Misi BRISyariah

- a. Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna .

Adapun Misi BRISyariah antara lain:

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengadepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran

3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas



Keterangan :

- a) PINCAPEM (Pimpinan Cabang Pembantu) : Pujo Budi Winarto
- b) BOS (Branch Operation Supervisor): Samsul Rizal
- c) CS (Customer Service) : AnisatunNafiah
- d) Teller : Henny
- e) AO :HabibiAnggoro
- f) UH (Unit Head) : Syamsul Amin
- g) AOM (Account Officer Micro) : a. Muhammad Baskoro
b. AbrozunNaim
c. Edi Iswanto
- h) Security : a. Taufiq
b. Jalmono
- i) OB (Office Boy) : Dwi

4. Ruang Lingkup BRISyariah

BRISyariah bergerak pada produk pendanaan (*funding*) dan pembiayaan (*financing*). Adapun dibawah ini rincian dari produk pendanaan dan pembiayaan:

a. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

a) Tabungan Faedah

Tabungan faedah adalah produk simpanan dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Tabungan faedah menggunakan akad wadiah yad

dhammanah yaitu pihak yang dititipi dana (bank) berhak menggunakan dana tersebut untuk dikelola/disalurkan kembali.

b) Tabungan Impian

Tabungan Impian adalah produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan. Tabungan impian menggunakan akad mudarabah mutlaqah yaitu pemilik dana (nasabah) memberikan kuasa penuh kepada bank untuk mempergunakan dana tersebut untuk dikelola/disalurkan.

c) SimPel

SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. SimPel (Simpanan Pelajar) menggunakan akad wadiah yad dhammanah yaitu pihak yang dititipi dana (bank) berhak menggunakan dana tersebut untuk dikelola/disalurkan kembali.

d) Tabungan Haji

Tabungan haji merupakan Produk simpanan dari BRISyariah bagi calon jemaah Haji Reguler dimana nasabah menitipkan dananya sebagai tabungan haji yang dananya hanya dapat diambil ketika nasabah menutup rekening haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Tabungan haji menggunakan akad mudarabah mutlaqah yaitu pemilik dana (nasabah) memberikan kuasa penuh kepada bank untuk mempergunakan dana tersebut untuk dikelola/dialurkan, dimana ada bagi hasil yang akan diperoleh nasabah yang nisbahnya sudah ditentukan diawal akad. Apabila dananya belum mencapai Rp.25.100.000,- dana tersebut masih terdapat di rekening nasabah, maka dana tabungan haji dapat dikelola atau disalurkan oleh bank untuk pembiayaan. Dan apabila dana tabungan nasabah sudah mencapai Rp.25.100.000,- nasabah harus mengajukan porsi haji ke Departemen Agama, dan kemudian akan dilakukan overbooking dana tabungan nasabah ke rekening Departemen Agama.

e) Giro BRISyariah iB

Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRISyariah dengan menggunakan akad Wadiah yad

dhammanah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro.

f) Deposito BRIS iB

Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan Akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Deposito BRISyariah menggunakan akad bagi hasil mudharabah mutlaqah yaitu pemilik dana (nasabah) memberikan kuasa penuh kepada bank untuk mempergunakan dana tersebut untuk dikelola/disalurkan. Nisbah bagi hasil pada deposito apabila dana yang dititipkan nasabah kurang dari Rp. 50.000.000,- dan penitipan dalam jangka waktu 1 bulan maka nisbah nya yaitu 46% untuk nasabah dan 54% untuk Bank. Sedangkan apabila dana yang dititipkan nasabah lebih dari Rp.50.000.000,- dan penitipan dalam jangka waktu 1 bulan maka nisbahnya yaitu 54% untuk nasabah dan 46% untuk Bank. Jangka waktu yang disepakati dapat diperpanjang secara otomatis.

b. Penyaluran dana (pembiayaan)

Penyaluran dana di BRISyariah KCP Metro disebut dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk keperluan konsumtif, produktif (pengembangan usaha

atau investasi) maupun modal kerja. Ada beberapa produk penyaluran dana yang ada di BRI Syariah antara lain :

a) Pembiayaan Mikro

Skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad Murabahah (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi. Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wirausaha dan atau pengusaha dengan lama usana minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan Mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR. Ada lima jenis pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Metro yaitu:

1. Mikro 25 iB

Mikro 25iB merupakan salah satu produk pembiayaan Mikro Banking yang ada di BRISyariah KCP Metro yang digunakan untuk keperluan produktif (pengembangan usaha atau investasi). Limit pembiayaannya berkisar antara 5juta-25juta, dengan jangka waktu pembiayaan 3-12 bulan. Pada pembiayaan mikro 25iB margin yang ditetapkan lebih tinggi, dikarenakan pada pembiayaan ini tidak dikenakan jaminan. Namun pihak bank tetap meminta dokumen jaminan untuk disimpan apabila sewaktu-waktu nasabah mengalami gagal bayar, jaminan tersebut disebut dengan negatif pledge.

2. Mikro 75 iB

Sama seperti mikro 25iB, untuk pembiayaan ini digunakan untuk keperluan produktif akadnya pun sama yaitu murabahah bil wakalah. Yang membedakannya yaitu pada limit pembiayaannya, yaitu mencapai 75 juta. Pada pembiayaan mikro 75 iB margin yang ditetapkan lebih kecil dibandingkan dengan mikro 25 iB dikarenakan pembiayaan mikro 75 iB nasabah diwajibkan untuk menyertakan jaminan. Jaminan yang disertakan dapat berupa : kendaraan bermotor, kios, los tanah kosong, tanah dan bangunan, deposito BRISyariah. Dengan jangka waktu 6-36 untuk pembiayaan modal kerja 6-60 bulan untuk pembiayaan investasi.

3. Mikro 200 iB

Nasabah hanya dapat meminjam dana sebagai modal usaha sebesar lebih dari 75 juta sampai dengan 200 juta dengan tenor maksimal 60 bulan. Pada pembiayaan mikro 200iB nasabah diwajibkan untuk menyertakan jaminan. Jaminan yang disertakan dapat berupa : kendaraan bermotor, kios, los tanah kosong, tanah dan bangunan, deposito BRISyariah. Dokumen jaminannya dapat berupa SHM, SHGB, SHMSRS, SHPTU/SIPTU, BPKB, Gadai Deposit.

b) KUR Mikro iB

Sebuah bantuan modal dari pemerintah yang dapat digunakan para pelaku UKM untuk mengembangkan usahanya, produk tersebut adalah Unit Mikro BRISyariah iB. Melalui Produk pinjaman tersebut Bank BRISyariah menyiapkan dana pinjaman mulai dari 5 Juta hingga pinjaman 25 Juta. Pada pembiayaan KUR 25iB tidak boleh menyertakan jaminan.

a) IMBT Mikro

Ijarah muntahiyya bittamlik IMBT atau Ijarah muntahiyya bittamlik adalah transaksi sewa-menyewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. IMBT merupakan jenis kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Jadi pada akad ini terdapat komitmen yang telah disepakati si penyewa yaitu komitmen untuk membeli barang tidak begitu kuat dan jelas. Maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa ijarah (sewa-menyewa). IMBT mikro adalah salah satu produk BRISyariah yang menggunakan akad ijarah muntahiyya bittamlik yang objek sewa akan diberikan oleh bank kepada nasabah dengan akad hibah pada akhir periode.

d) Pembiayaan Non Mikro

Pembiayaan ini digunakan untuk keperluan konsumtif atau untuk keperluan pribadi. BRISyariah memiliki beberapa produk untuk jenis pembiayaan ini yaitu sebagai berikut :

1. KPR Sejahtera

KPR Sejahtera adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank BRISyariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat melalui Lembaga Perbankan yang sasarannya untuk menurunkan tingkat margin pembiayaan KPR bagi MBR.

2. IMBT Non Mikro

Pembiayaan IMBT konsumen BRIS iB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah dengan sistem sewa menyewa aset milik BRISyariah yang diperoleh melalui pembelian dari dari nasabah/pihak ketiga, dengan opsi pengalihan

kepemilikan atas aset oleh BRI Syariah kepada nasabah pada saat fasilitas pembiayaan lunas (jual beli/hibah).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan Faedah di BRISyariah KCP Demak

Berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³¹ Tabungan Faedah yang diterapkan di BRISyariah KCP Demak menurut Bapak Rizal adalah Wadi'ah dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah yaitu pihak yang dititipi dana (bank) berhak menggunakan dana tersebut untuk dikelola/disalurkan kembali. Penyalurannya yaitu untuk pembiayaan.³² Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa pembuatan tabungan faedah di BRISyariah KCP Demak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. Melampirkan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

³¹Adiwarman A. Karim, Bank Islam analisis fiqh dan keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 297

³² Wawancara dengan Bapak Tedy Amal Satia, Branch Operation Supervisor BRISyariah KCP Metro pada tanggal 24 April 2019

c. Memiliki produk Tabungan Faedah BRISyariah iB sebagai rekening induk.

1. Pelaksanaan Tabungan Faedah di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Demak

Tabungan Faedah BRISyariah iB adalah tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah yang dapat disetor dan diambil kapan saja, dengan konsep Wadi'ah Yad Dhamanah bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan Giro, tabungan dan deposito untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat atau nasabah. Akan tetapi konsekuensi dari prinsip Yad Dhamanah yaitu pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun begitu pun sebaliknya jika mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank.³³ Tabungan faedah adalah tabungan dengan setoran awal Rp. 100.000.- dan gratis biaya administrasi selain itu juga tabungan faedah gratis biaya ATM bulanan.

Kelebihan dari Tabungan Faedah adalah sebagai berikut :

- a. Beragam FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah)
- b. Setoran awal Rp. 100.000,-
- c. Gratis biaya administrasi bulanan.
- d. Gratis biaya Kartu ATM Bulanan

³³ Wawancara dengan Annisa, Customer Service BRISyariah KCP Metro pada tanggal 24 April 2019

- e. Biaya tarik tunai murah di seluruh jaringan ATM BRI, Bersama & Prima*)
 - f. Biaya transfer murah atas jaringan ATM BRI, Bersama & Prima*)
 - g. Biaya Cek Saldo murah di jaringan ATM BRI, Bersama & Prima*)
 - h. Biaya debit prima murah*)
 - i. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas e-channel berupa SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking.
- 1) Jika saldo sebelum transaksi lebih besar sama dengan Rp 500.000,- maka diskon 50% untuk biaya transaksi e-channel.
- *) Nasabah langsung mendapatkan ATM dan tidak perlu menunggu.

Dari berbagai penjelasan yang disebutkan diatas sehingga inilah yang membuat masyarakat tertarik untuk membuka rekening Tabungan Faedah di BRISyariah KCP Demak. Tidak ada biaya administrasi dan bebas biaya bulanan sehingga nasabah tertarik untuk menabung dan alasan lain menurut penuturan Ibu Kartika yaitu ketika membuka rekening tabungan nasabah tidak dibuat menunggu untuk mengambil ATM akan tetapi di BRISyariah KCP Demak ATM bisa ditunggu dan langsung diberikan ketika selsai akad.

Pembukaan Tabungan Faedah Dalam pembukaan rekening tabungan setiap bank sudah pasti berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku, untuk BRISyariah KCP Demak menetapkan setoran pertama Rp. 100.000,-

Selain penetapan jumlah setoran pertama, bank juga menetapkan jumlah saldo minimal setoran yang harus ada di rekening, untuk saldo minimal pada rekening tabungan faedah adalah Rp. 50.000,- dan jika saldo dibawah minimum maka akan dikenakan biaya Rp.12.500,-

Pada pembukaan rekening Tabungan Faedah Customer Service akan minta memberikan persyaratan yaitu melampirkan foto copy KTP dan Melampirkan NPWP jika ada.³⁴

Setelah itu nasabah akan diberikan Aplikasi Pembukuan Rekening tabungan faedah kemudian aplikasi yang telah diisi oleh nasabah lalu diserahkan kepada bagian pelayanan (Customer Service).

Adapun pembukaan rekening Tabungan Faedah adalah sebagai berikut:

1. Calon nasabah datang langsung di BRISyariah KCP Demak dan langsung menghubungi Customer Service.

³⁴ Wawancara dengan Annisa, Customer Service BRISyariah KCP Demak pada tanggal 24 April 2019

2. Customer Service akan melayani nasabah dengan ramah dan menawarkan bantuan kepada calon nasabah.
3. Kemudian calon nasabah akan diberikan penjelasan oleh Customer Service tentang hal-hal yang berkaitan dengan produk penghimpunan dana salah satunya tabungan faedah dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah.
4. Setelah nasabah mendapat informasi dan penjelasan tentang tabungan faedah dari bagian Customer Service dan calon nasabah bersedia menjadi penabung selanjutnya Customer Service meminta calon nasabah untuk melengkapi dan menandatangani formulir yang disediakan BRISyariah KCP Demak.
5. Setelah formulir diisi dengan lengkap, formulir tersebut diserahkan kembali kepada bagian pelayanan untuk di periksa jika masih ada yang kurang lengkap lalu kemudian di input.
6. Selanjutnya bagian pelayanan menerima kembali formulir yang sudah diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan identitas diri nasabah.
7. Customer Service mengentri data calon nasabah pada sistem komputer sesuai dengan formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan faedah.

8. Nasabah lalu menyerahkan syarat-syarat yang sudah menjadi ketentuan bank yaitu : fotocopy KTP dan melampirkan NPWP jika ada.
9. Nasabah mengisi slip setoran awal.
10. Customer Service memberikan kertas spectroline untuk di tandatangani nasabah, sebelum di tandatangani hendaknya diletakkan tepat diatas kotak tanda tangan yang telah tersdia pada bagian cover buku tabungan.
11. Kemudian Customer Service memberikan berkas formulir kepada Branch Officer Supervisor (BOS)
12. Branch Office Supervisor memeriksa kelengkapan persyaratan dan pencocokan tanda tangan.
13. Mengaktifkan rekening tabungan faedah dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
14. Branch Office Supervisor (BOS) memberikan tanda tangan dan nama jelas, kemudian diserahkan kembali kepada Customer Service.
15. Setelah Customer Service menerima kembali dokumen dari Branch Officer Supervisor (BOS) selanjutnya menyimpan berkas pembukaan rekening dalam bentuk file, lalu meminta nasabah untuk melakukan setoran awal di teller.

16. Teller menerima kemudian memeriksa slip setoran dan uang tunai sejumlah yang tertera pada slip setoran.
17. Teller mencetak data nasabah pada buku tabungan yang berisikan nomer rekening, nama, alamat, dan tanda pembukuan.
18. Menginput ke dalam komputer serta slip setoran dan buku tabungan yang telah di validasi.
19. Menandatangani buku tabungan dan slip setoran serta diberikan stempel BRISyariah, kemudian Teller menyerahkan buku tabungan kepada nasabah.³⁵

*) Slip setoran rangkap dua, yang satu untuk Teller sebagai Arsip dan rangkap dua diberikan kepada nasabah.

2. Penutupan Rekening Tabungan faedah

Mekanisme penutupan rekening tabungan faedah di BRISyariah KCP Demak adalah sebagai berikut :³⁶

- a. Para pihak sepakat sepakat mengakhiri akad
- b. Nasabah meninggal dunia
- c. Nasabah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau menyalahgunakan rekening tabungan untuk sesuatu yang tidak sesuai syariah

³⁵ Wawancara dengan Annisa, Customer Service BRISyariah KCP Metro pada tanggal 24 April 2019

³⁶ Wawancara dengan Bapak Rizal, Branch Operation Supervisor BRISyariah KCP Demak pada tanggal 24 April 2019

B. Bonus Tabungan Faedah

Tabungan faedah adalah dana titipan yang dititipkan oleh nasabah kepada bank kemudian bank boleh memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan berbagai jenis usaha dengan prinsip syariah. Karena nasabah mempercayakan dananya di bank maka pihak bank memberikan bonus kepada nasabah sebagai tanda terimakasih karena dana tersebut boleh dimanfaatkan. Menurut penuturan Ibu Annisa pemberian bonus di BRISyariah KCP Demak akan diberikan sesuai dengan keuntungan bank, dan karena bonus sifatnya tidak mengikat sehingga pihak bank dapat memberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan, bonus tidak boleh diperjanjikan di awal pada saat akad, karena bukan kewajiban bagi penerima titipan. Penentuan besarnya bonus tabungan tergantung pada masing-masing bank syariah, namun pada umumnya bank syariah memberikan bonus untuk tabungan faedah lebih tinggi dibandingkan dengan bonus tabungan yg akadnya sama yaitu menggunakan prinsip. Hal ini disebabkan karena tabungan faedah stabilitas nya lebih stabil dibandingkan dengan produk penghimpun dana yang lain, Sehingga bonusnya lebih besar. Menurut Ibu Maspi'ah sebagai nasabah BRISyariah KCP Demak mengenai bonus yang diberikan pihak bank dia tidak mengetahui jika ada pemberian bonus dari pihak yang diberi titipan karena menurutnya pada saat awal akad CS tidak menjelaskan mengenai pemberian bonus tersebut, dia hanya

mengikuti dan menyerahkan syarat pembukaan rekening dan mengisi form yang diserahkan oleh CS. BRISyariah KCP Demak menetapkan besaran bonus pada produk tabungan faedah yaitu sebesar 0,25% per tahun untuk saldo minimal 1 juta. Penarikan rekening Tabungan Faedah dapat di mesin ATM Bank lain atau ATM bersama, namun jumlah penarikannya di batasi berbeda dengan produk penghimpun dana yang lain yang dapat dicairkan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sehingga sangat labil.

C. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Faedah Di BRI Syariah KCP Demak

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat pedesaan. Usaha penghimpunan dana (Funding) dilakukan oleh BRISyariah KCP Demak untuk menarik simpanan atau tabungan dari masyarakat guna menambah modalnya sendiri yang cukup kuat agar ia dapat terjun pada lapangan investasi dengan mantap dan berani. Proses penghimpunan dana dikemas dengan menarik dalam setiap produk simpanan atau tabungan. Berbagai macam fitur atau keunggulan setiap produk ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti brosur yang dikeluarkan oleh BRISyariah KCP Demak. Begitu pula penjelasan tentang mekanisme dan akad-akad yang dipakai dalam setiap produk juga telah terdapat di

dalamnya. Sehingga, hal tersebut memudahkan seseorang yang ingin menitipkan dananya di BRISyariah KCP Demak.

Selain itu, sebuah lembaga keuangan tentunya memiliki prosedur pelaksanaan kelembagaan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut timbul (mungkin) beberapa faktor seperti obyek nasabah, jenis produk, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan tersebut kiranya dapat dimaklumi karena yang terpenting dalam lembaga keuangan adalah pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedurnya.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan memiliki ketentuan yang menjadi dasar untuk penerapan tabungan wadi'ah yakni bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan, serta tidak ada imbalan (bonus) yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Menurut penulis, BRISyariah KCP Demak sudah memenuhi poin pertama ketentuan umum tabungan wadi'ah yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN yaitu bersifat simpanan, terbukti bahwa tabungan faedah merupakan salah satu produk simpanan yang ada di BRISyariah KCP Demak, dan merupakan simpanan harian berdasarkan SOM (Sandar Operasional Manajemen).

Poin kedua pada Fatwa DSN No. 02/ DSN-MUI/IV/2000 berbunyi simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan. Dalam penerapan akad wadi'ah pada

produk tabungan faedah bahwa dana yang disimpan dapat digunakan oleh pihak bank dan dapat diambil oleh nasabah sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Keduanya merupakan simpanan yang bersifat harian, bukan bersifat tabungan berjangka, jadi dapat diambil sewaktu-waktu baik datang langsung ke kantor kas, atau melalui marketing.

Sedangkan pada poin ke tiga berbunyi tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. dalam hal pemberian tersebut, biasanya pihak Bank Syariah memberikan bonus. Pemberian bonus dalam akad wadi'ah adalah diperbolehkan tetapi dengan ketentuan bahwa bonus bukanlah imbalan yang bersyarat dan tidak disebutkan diawal akad. Dalam artian ketika melaksanakan akad, bonus tidak boleh disebutkan, tidak dicantumkan dalam brosur dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara advance. Imbalan untuk akad wadi'ah hanyalah pemberian ('athaya) secara sukarela dari pihak bank. Motif pemberian tersebut juga hanya sebatas rasa terimakasih karena telah dipercaya untuk mengelola dana titipan hingga mendapatkan keuntungan. Pemberian tersebut tidak boleh ada keterikatan, seperti diperjanjikan di muka.

Menurut penulis, dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI tentang tabungan wadiah di BRISyariah KCP Demak dalam penerapannya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor. 02/DSNMUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengamatan tentang Tabungan Faedah iB di BRISyariah KCP Demak, peneliti dapat menjelaskan bahwa Tabungan faedah iB yang ada pada BRISyariah KCP Demak yang memakai akad Wadi'ah Yad Dhamanah, dimana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang di titipkan. sehingga keuntungan dan kerugian di tanggung seluruhnya oleh bank. Pengelolaan tabungan faedah yaitu dari dana yang dihimpun oleh bank kemudian bank menyalurkan dana tersebut kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

Setelah bank menyalurkan pembiayaan kepada nasabah defisit, bank secara tidak langsung telah memutar dana tabungan faedah untuk keuntungan bank, dengan demikian BRISyariah dapat memberikan bonus kepada nasabah tabungan faedah. Bank boleh memberikan bonus dengan catatan tanpa ada perjanjian sebelumnya atau diawal akad, bonus yang diberikan BRISyariah kepada nasabah sebesar equivalent 0,25% untuk minimal tabungan 1 juta. Dengan demikian nasabah semakin yakin dengan kinerja dari bank BRISyariah, dan inilah yang membuat BRISyariah menjunjung nilai keberkahan bagi para nasabahnya. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh

bonus sebesar 0,25% pertimbangan BRI Syariah KCP Demak memberikan bonus 0,25% antara lain:

1. Berdasarkan pendapatan bank tiap tahun
2. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan

Jika ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSNMUI/IV/2000 Tentang Tabungan, maka tabungan faedah yang diterapkan oleh BRISyariah KCP Demak sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSNMUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Dimana dalam pemberian bonus yang dilakukan oleh BRISyariah KCP Demak tidak diperjanjikan diawal akad, melainkan bentuk pemberian ('athaaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Misalnya bonus yang diberikan kepada nasabah sebagai tanda terimakasih yang tidak diperjanjikan.

B. Saran

Setelah mengambil beberapa kesimpulan, selanjutnya peneliti akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat, adapun saran-sarannya sebagai berikut :

1. Produk-produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariah harus di pertahankan dan terus dikembangkan dengan melakukan inovasi-inovasi baru.
2. Bank merupakan lembaga keuangan yang berhubungan dengan pelayanan, untuk menentukan pelayanan yang terbaik bagi

nasabah. BRISyariah telah membuktikan dengan produk-produk yang menarik bagi nasabah, sehingga perlu adanya inovasi terus-menerus agar tercapainya visi-misi bank.

DAFTAR PUSTAKA

Umum

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan Edisi Dua, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Al Hadi, Abu Azam. Fikih Muamalah Kontemporer. Depok: Raja Grafindo Persada. 2017

Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.

Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah :Dari Teorike Praktek, Jakarta: Gema Insane Press, 2001.

Ascarya. 2008. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Prenada Media Group.

Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenada Media Group.

Muhammad. 2000. System dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.

Sjahdeini, Sutan Remy, Perbankan Syariah, Jakarta :Prenadamedia Group, 2014.

Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan , Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers. 2014

Jurnal dan Skripsi :

Aisyah, Siti. Jurnal: Penghimpunan Dana Masyarakat dengan Akad Wadi'ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah, Jurnal Syariah. Vol.5. No.1. 2016.

Indrawati, Sri Eko Ayu. Skripsi: Implementasi Prinsip Wadi'ah dalam Operasionalisasi di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang. Malang : Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012.

Aprliani, Detty. Skripsi: Implementasi Wadi'ah Dalam Fatwa Dsn Mui Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Di Bmt Al Hikmah Ungaran. Semarang : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 2018.

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Rizal (BOS) pada tanggal 26 April 2019 di Kantor Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pembantu Demak.

Wawancara dengan Ibu Annisa (CS) Pada tanggal 26 April 2019 di Kantor Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pembantu Demak.

Dokumen :

Brosur-Brosur BRISyariah KCP Demak

Formulir Pembukaan Tabungan Faedah

Fatwa DSN-MUI Nomor 02/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Internet:

<https://sharianomics.wordpress.com/2010/11/17/sertifikat-wadiah-bankindonesia-swbi-2/>. Diakses pada tanggal 11 April 2019, pukul 08.02 WIB.

TABUNGAN
FAËDAH
 BRISyariah iB



SERBA GRATIS

SALDO AWAL RINGAN Rp. 50.000,-	GRATIS BIAYA BULANAN KARTU ATM	GRATIS BIAYA DEBIT PRIMA	GRATIS BIAYA Administrasi BULANAN Tabungan
GRATIS BIAYA TARIK TUNAI di mesin ATM BRI Bersama dan Prima	GRATIS BIAYA CEK SALDO di mesin ATM BRI Bersama dan Prima	GRATIS BIAYA TRANSFER di mesin ATM BRI Bersama dan Prima	

calIBRIS 500-789
www.brisyariah.co.id

f BRI Syariah

@BRI Syariah

Bersama Wujudkan Harapan Bersama



APLIKASI PEMBUKAAN TABUNGAN HAJI BRISyariah IB
(Akad Mudharabah Muthlaqah)

No. CIP* : _____
 Rekening Tabungan Haji BRISyariah IB* : _____
 *Jumlah dan Periode : _____

HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK
 (selanjutnya disebut BANK) dengan rincian sebagai berikut :

ISI PEMERIKSA

Nama																				
Tempat/Tgl lahir																Ydd-mm-yyyy				
KTP/Paspor/KITAS*																				
Alamat rumah																				
RT			RW																	
Kelurahan																				
Kecamatan																				
Kabupaten / Kota																				
Provinsi																				
Tempat rumah																				
Motong Zakat Bagi Hasil :			Ya			= 2.5 % atau	%			Tidak										

Akad Tabungan Haji BRISyariah IB

Ingan menandatangani Aplikasi ini, saya menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada akad Tabungan Haji BRISyariah IB (selanjutnya disebut Akad) sebagai berikut :

NASABAH dengan ini bermaksud untuk menempatkan dana kepada BANK dan BANK bersedia memanfaatkan dan mengelola dana NASABAH yang diadministrasikan dalam bentuk Rekening Tabungan Haji BRISyariah IB atas nama NASABAH pada BANK dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.

BANK akan mengikutsertakan NASABAH dalam program asuransi jiwa dengan perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK, sebagaimana aplikasi isian NASABAH untuk program Asuransi Jiwa yang menjadi bagian dari pembukaan Tabungan Haji BRISyariah IB.

NASABAH menanggung resiko investasi dan memberi persetujuan/ijin kepada BANK untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada BANK dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh BANK sesuai dengan prinsip Mudharabah Muthlaqah tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip syariah.

NASABAH dan BANK sepakat bahwa NASABAH hanya dapat melakukan penarikan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK dan sepakat untuk berbagi hasil atas dana NASABAH yang ditempatkan tersebut dengan nisbah bagi hasil sebesar% (terbilang..... persen) untuk NASABAH dan sebesar% (terbilang..... persen) untuk BANK yang akan dihitung, dibukukan, dan dibagikan secara bulanan berdasarkan prinsip distribusi bagi hasil.

Ketentuan nisbah bagi hasil tersebut di atas berlaku sampai dengan adanya perubahan nisbah bagi hasil yang disepakati antara BANK dan NASABAH.

NASABAH setuju untuk memberikan data pribadinya untuk tujuan komersial lainnya, serta data simpanan di Tabungan Haji BRISyariah IB untuk keperluan asuransi kepada perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK.

NASABAH dengan ini tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening PT. Bank BRISyariah dan peraturan lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad.

Akad ini berlaku sejak tanggal dibukanya rekening Tabungan Haji BRISyariah IB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad yang disebabkan oleh penutupan rekening Tabungan Haji BRISyariah IB atas sebab apapun dan/ atau sebab lain yang diatur dalam syarat ketentuan umum dan syarat ketentuan khusus yang telah disepakati UNK dan NASABAH, termasuk diantaranya adalah sebab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (force majeure). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Customer Information File (CIF).

NASABAH

(_____)
 Nama dan Tanda Tangan

PT. BANK BRISYARIAH (BANK)

(_____)
 Nama dan Tanda Tangan

set yang tidak perlu
 nbar putih untuk Bank
 nbar kuning untuk Nasabah

04/01/2013

Harap diisi dengan huruf cetak dan diberi tanda (x) pada kotak pilihan yang sesuai

Gelar : _____ : Pendidikan Terakhir : _____
 Nama Gadis Ibu Kandung : _____
 Agama : ☐ Islam ☐ Protestan ☐ Katolik ☐ Hindu ☐ Budha ☐ Khonghucu ☐ Lainnya : _____

I. DATA KEUANGAN NASABAH **

Sumber Dana ☐ Gaji ☐ Hasil Usaha ☐ Deposito/Hasil Investasi ☐ Lainnya : _____
 Tujuan Pembukaan Rekening ☐ Menyimpan Dana ☐ Transaksi ☐ Investasi ☐ Lainnya : _____
 Penghasilan Per Bulan ☐ ≤ 1 Juta ☐ > 1 - 2,5 Juta ☐ > 2,5 - 5 Juta ☐ > 5 - 10 Juta ☐ > 10 - 100 Juta ☐ >100 Juta
 Nilai Transaksi Normal ☐ ≤ 1 Juta ☐ > 1 - 2,5 Juta ☐ > 2,5 - 5 Juta ☐ > 5 - 10 Juta ☐ > 10 - 100 Juta ☐ >100 Juta
 Maksimal Frekuensi Transaksi per Hari ☐ ≤ 10 Kali ☐ 10 - 50 Kali ☐ 51 - 75 Kali ☐ 76 - 100 Kali ☐ > 100 Kali

** Pilih salah satu

II. DATA PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan ☐ PNS/SUMN ☐ TNI/POLRI ☐ Pegawai Swasta ☐ Profesional ☐ Wiraswasta
☐ Pelajar/Mahasiswa ☐ Ibu Rumah Tangga ☐ Petani/Peternak ☐ Lainnya : _____
 Nama Tempat Kerja : _____
 Bidang Pekerjaan : _____
 Lama Bekerja : _____
 Alamat Tempat Kerja : _____
 Telp. Kantor : _____
 Kode Pos : _____
 Fax : _____

III. DATA KELUARGA/KERABAT YANG BISA DIHUBUNGI

Nama Kerabat : _____
 Hubungan dengan Nasabah : _____
 Alamat Tempat Tinggal : _____
 Telp. Rumah : _____
 Email : _____
 Telp. Seluler : _____

Mengetahui

 Nama & Tanda Tangan Pelugas Bank

 Nama & Tanda Tangan Nasabah

SURAT PERNYATAAN NPWP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama (sesuai KTP/ Paspor) :

("nasabah")

Tempat, Tanggal Lahir

Nomor KTP / Paspor*)

Alamat

No.Rekening/ Cabang BRIS :

menyatakan bahwa saat ini nasabah tidak dapat menyerahkan NPWP sebagai kelengkapan dokumen pembukaan rekening di BRISyariah, dikarenakan :

- ☐ Saat ini nasabah tidak memiliki NPWP karena termasuk kategori PTKP
- ☐ Bukan merupakan wajib pajak, namun akan menggunakan dan menyerahkan NPWP suami/istri/orang tua/wali*), apabila suami/istri/ orang tua wali*) termasuk Non PTKP
- ☐ Merupakan wajib pajak (Non PTKP) namun belum memiliki/ tidak membawa/ lupa nomor NPWP*) dan sesegera mungkin akan mengurus/ menyerahkan NPWP kepada BRISyariah

Seluruh informasi tersebut diatas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, segala akibat dan risiko yang mungkin timbul dikemudian hari sebagai akibat ketidaksesuaian/ ketidakberanian pernyataan ini dan/ atau informasi tersebut diatas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari nasabah dan karenanya melepaskan BRISyariah dari tanggung jawab dan risiko yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

(_____)

*) coret yang tidak perlu



syariah

KARTU CONTOH TANDATANGAN

Cabang :

No. Rekening :		
Nama :		
Alamat :	Nama :	Nama :
Telepon :		
Contoh Stempel Perusahaan :	Nama :	Nama :
	Ketentuan Tanda Tangan :	
DIISI OLEH BANK		
Tgl. Pembukaan Rekening :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
Jenis Rekening :		
Tgl. Mulai Berlaku :	Nama :	Nama :

14055021

BRI Syariah IB

Perkreditan Syariah

PT. Bank BRI Syariah

(066-mm-1111)



(jurnalnya disebut Akad)

yang disahkan dan
diterima oleh BANK
gimana aplikasi isian



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

**FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000**

Tentang

TABUNGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
- c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-rela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الْوَيْثُ أَمَانَتَهُ، وَلْيُتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

"dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...."

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سِدُّنَا الْعِمَاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ النَّالَ مُعَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَتْرَلْ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ قَالَةً فَاتٍ كَيْدَ رَمْلَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ حَسِنًا، فَلَعَّ خُرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَحَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia menyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَه: الْبَيْعُ إِلَى أَحَدِي، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صحيح)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradabah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْفَلَاحُ حَتَّى يَتَنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَلَحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaiannya yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Anur bin 'Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah *fiqh*:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَدْلَى دَلِيلٍ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('*athaya*') yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H
1 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nadiya Khumairah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 01 Mei 1997
Alamat : Jl. Krajan 01 Rt/Rw 02/03 Desa Sukobendu
Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan
Agama : Islam

No. Hp : 085852414044
Email : nadiyakhumairah@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. MI Ishlahiyyah Sukobendu | Tahun Lulus 2009 |
| 2. SMP Negeri 3 Sugio | Tahun Lulus 2012 |
| 3. MA Mambaus Sholihin | Tahun Lulus 2015 |
| 4. UIN Walisongo Semarang | Tahun Lulus 2019 |